



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD RISAL WASAL
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 260380

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.091.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/183 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
5. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **170.300.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.950.000
2. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000
4. LAINNYA, SELIS SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.450.000



5. LAINNYA, ELEMENT SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 2.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.359.893.588
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.659.293.588

III. HUTANG Rp. 648.224.372

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.011.069.216

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.